

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal. Perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Angka kemiskinan agregat atau yang disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa. Penghitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, dalam implementasinya dihitung garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran dan pendapatan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin (Kementrian Kominfo, 2011)

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang mempunyai tingkat kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunnya jumlah penduduk miskin. Efektifitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dalam memilih strategi pembangunan, hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Wijayanto,2010)

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi

sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak hak dasar yang diaukui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, pertanahan, air bersih, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

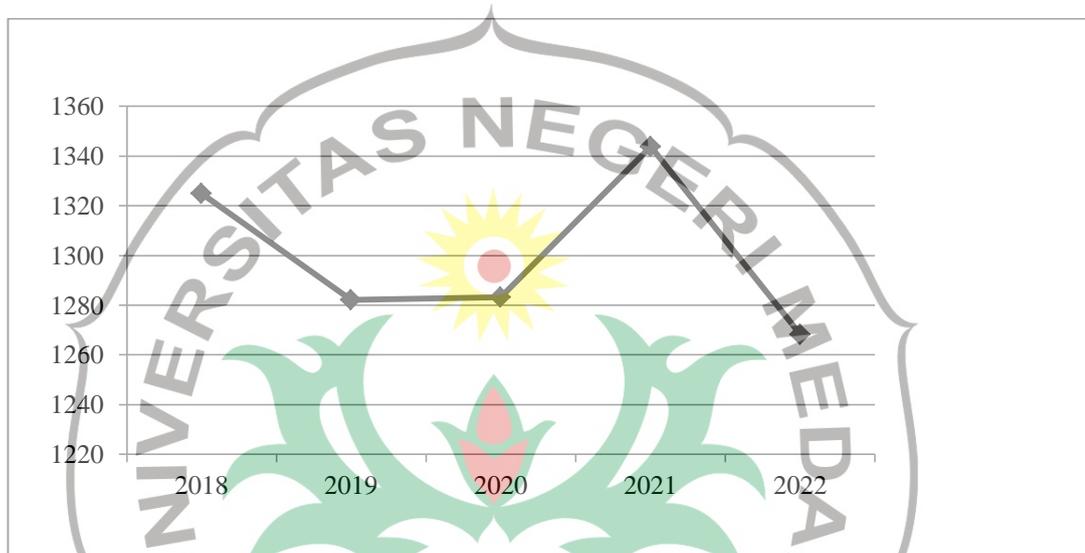
Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, Kemiskinan melibatkan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, serta aspek lainnya sehingga bersifat multidimensi. Kompleksitas ini juga merambah ke berbagai persoalan masyarakat seperti keterbelakangan pola pikir, kesenjangan sosial, serta kawasan kumuh yang mengakibatkan kemiskinan menjadi permasalahan sosial ekonomi yang sulit ditanggulangi. Selain timbulnya masalah-masalah sosial, kemiskinan juga memengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Menurut Maipita (2014) “ Kemiskinan adalah dimana kondisi tidak terpenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai”. Kondisi masyarakat dapat dikatakan miskin jika pendapatan/pengeluaran dibawah angka garis kemiskinan.

Menurut Melbourne Institute(2012) garis kemiskinan dapat diartikan sebagai tingkat pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila seseorang dibawah tingkat tersebut, maka ia digolongkan miskin.

Persoalan kemiskinan melanda seluruh wilayah Negara Indonesia, tidak terkecuali pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang cenderung berfluktuasi. Sumatera Utara sebagai salah satu dari 38 provinsi di Indonesia tidak lepas dari persoalan kemiskinan bahkan berada diantara posisi tertinggi di Indonesia dan saat ini, pemerintah daerah sedang berusaha melakukan pengentasan kemiskinan secara regional yang diharapkan juga akan berdampak pada pengentasan kemiskinan secara nasional. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu wilayah selalu menjadi masalah yang serius karena dampak yang ditimbulkan kemiskinan begitu besar. Orang miskin tidak akan mampu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang berdampak pada kekurangan gizi serta relatif mendapatkan pendidikan menengah kebawah sehingga akan sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah pengangguran. Kondisi ini yang mendasari bahwa pengentasan kemiskinan itu wajib. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan sama sekali, tetapi dapat dikurangi melalui program pembangunan yang berkelanjutan.

Berikut tabel dan grafik data perkembangan jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Utara dengan tahun amatan 2018-2022:



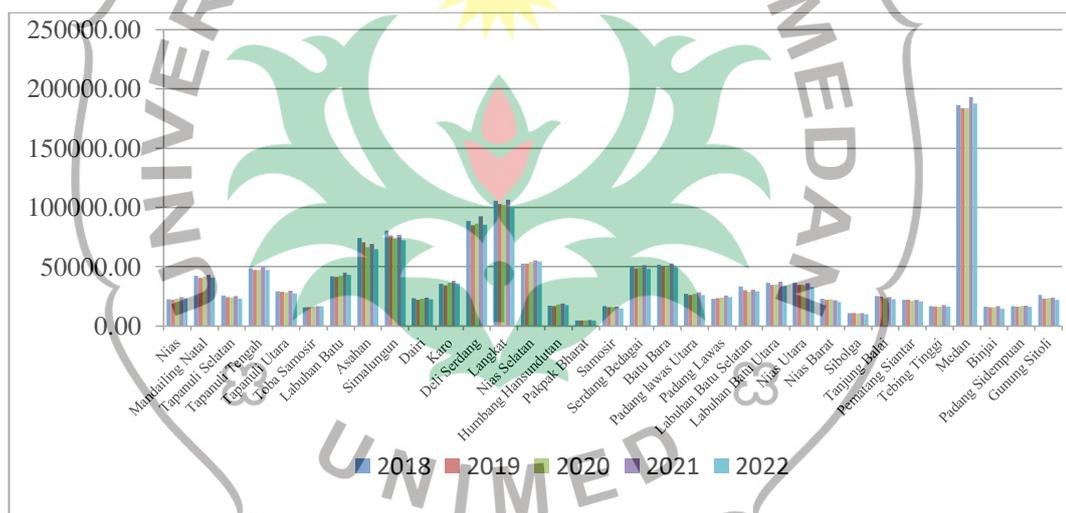
Sumber: BPS SUMUT (data diolah 2023)

Gambar 1.1 Gambar Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas data jumlah penduduk miskin menunjukkan perkembangan dari tahun 2018 sampai 2022 di provinsi Sumatera Utara. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Sumatera Utara cenderung naik turun, mengalami penurunan di tahun 2019, kemudian meningkat pada tahun 2020 lalu meningkat signifikan pada tahun 2021, lalu menurun kembali pada tahun 2022. Kenaikan yang terjadi tahun 2019-2022 dipicu oleh pandemi Covid-19 yang memang secara nasional melanda seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Utara. Dalam masa ini terjadi krisis ekonomi global dimana meningkatnya resiko kemiskinan. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk tetap dirumah atau karantina menyebabkan kepanikan massal terhadap masyarakat terkait kekurangan bahan

pangan untuk dikonsumsi sehingga terjadi peningkatan simpanan pangan yang selanjutnya menyebabkan kenaikan harga pangan itu sendiri. Hingga pada saat ini pemerintah masih terus melakukan pemulihan dari sisi ekonomi untuk mengatasi dampak yang di sebabkan oleh pandemi khususnya dampak pasca pandemi.

Berikut grafik data jumlah penduduk miskin dalam satuan jiwa di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2018-2022:



Sumber: BPS SUMUT (data diolah 2023)

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Pada Tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin pada di tingkat Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara dalam periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Kenaikan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021. Selama periode tahun 2018-2022 jumlah penduduk miskin pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara tertinggi terletak di wilayah yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Peringkat tertinggi terletak di wilayah kota Medan dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 186.910 jiwa. Jumlah tersebut sangat tinggi jika

dibandingkan dengan rata-rata jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dan Indonesia. Salah satu penyebab melonjaknya jumlah penduduk miskin di kota Medan adalah dampak dari pandemi dimana meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan oleh PHK massal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu secara makro yaitu kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi yang timpang. Penduduk miskin memiliki sumberdaya terbatas dan kualitasnya rendah. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Kemiskinan juga muncul akibat perbedaan akses dalam modal. (Sharp, 1996)

Menurut Samuelson dan Nordhous (2004) bahwa penyebab dan terjadinya penduduk miskin dinegara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Selain itu hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Di daerah perkotaan, derasnya arus migran dari luar daerah yang masuk juga memberi dampak terhadap semakin banyaknya penduduk dalam kategori miskin.

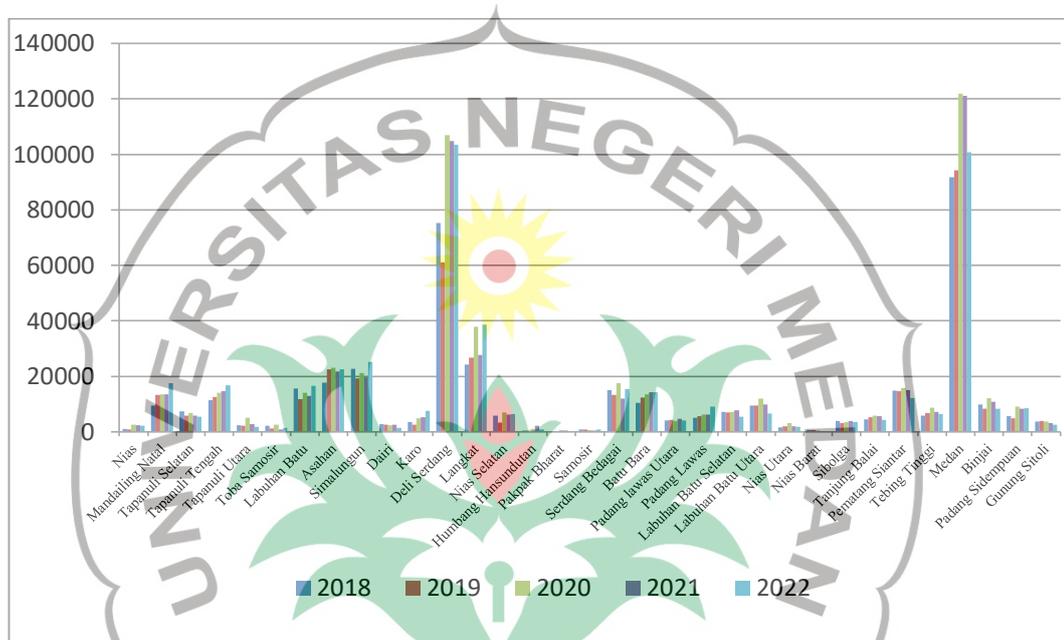
Disamping memang sebagian besar dari mereka berpendapatan rendah karena kualitas sumber daya manusianya juga rendah sehingga meningkatkan jumlah pengangguran.

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin adalah jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Menurut *International Labour Organization (ILO)*, pengangguran didefinisikan sebagai mereka yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan. Sedangkan menurut BPS (2016), yang dimaksud dengan pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan.



THE
Character Building
UNIVERSITY

Berikut grafik data Jumlah Pengangguran dalam satuan Jiwa di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2018-2022



Sumber: BPS Sumut (diolah, 2023)

Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pengangguran Pada Tingkat Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik di atas, bisa diamati bahwa jumlah pengangguran tingkat kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara masih sangat tinggi. Dapat dilihat pada data yang telah disajikan selama periode tahun 2018-2022, kabupaten dan kota dengan jumlah penganggur tertinggi adalah Kota Medan dengan rata-rata jumlah penganggur sebanyak 105.902 jiwa dan sedangkan kabupaten dan kota dengan jumlah penganggur terendah adalah kabupaten Pakpak Bharat dengan rata-rata jumlah penganggur sebanyak 272 jiwa. Jumlah penganggur berfluktuasi pada tahun 2019-2022 terjadi karena pada tahun 2020 dunia dihebohkan dengan wabah *covid* 19 yang tidak hanya berdampak di sosial dan kesehatan, namun ekonomi juga ikut terdampak. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi

nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan terkhusus di Provinsi Sumatera Utara yang dimana banyak perusahaan di Sumatera Utara yang harus harus mengurangi jumlah tenaga kerja bahkan harus memberhentikan seluruh tenaga kerja yang dimiliki akibat dari pandemi.

Dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah di terima bekerja tetapi belum mulai bekerja. (BPS, 2020)

Jumlah penduduk yang meningkat akan menimbulkan banyaknya jumlah angkatan kerja. Banyaknya angkatan kerja tetapi tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan mengakibatkan banyak angkatan kerja yang menganggur sehingga menyebabkan pengangguran yang akan meningkatkan kemiskinan. Pernyataan tersebut didukung oleh teori Lundahl (2005) dimana pertumbuhan penduduk yang tinggi artinya akan ada peningkatan angkatan kerja, sehingga perlu ada peningkatan jumlah lapangan kerja. Jika tidak dampak yang ditimbulkan dalam jangka panjang yaitu kemiskinan yang meningkat.

Menurut Sukirno (2000) pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara.

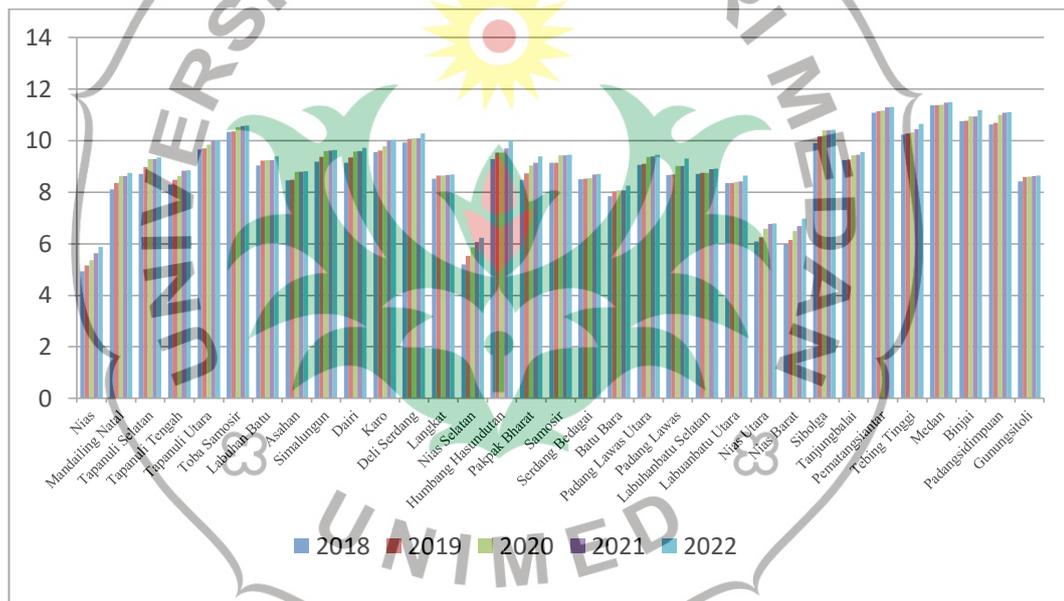
Kajian yang mengaitkan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teoritis jumlah penduduk miskin bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan, jumlah penduduk miskin cenderung juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya diantaranya (Woyanti,2018) yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan hasil riset lain, (Giovanni,2018) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin. Oleh karena terdapat kesenjangan yang ditemukan dari hasil riset antar peneliti tersebut, sehingga kajian ini menjadi menarik diteliti untuk mengungkap lebih jauh pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap kemiskinan khususnya pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.

Selain Jumlah Pengangguran, Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin adalah Pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu faktor terpenting yang dapat membantu seseorang keluar dari zona kemiskinan. Pendidikan akan memberikan pengaruh jangka panjang dalam memperbaiki kehidupan ekonomi. Dalam tingkatan tertentu pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk satu-satunya memperoleh pekerjaan, dimana juga dibutuhkan juga kreatifitas dan daya saing. Pendidikan dapat mengasah kemampuan dan keterampilan dalam menghadapi masalah dengan tepat.

Rata-rata Usia Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dalam bidang

pendidikan. RLS ini melihat rata rata usia lama sekolah yang ditempuh penduduk usia produktif yaitu usia 15 tahun keatas. Semakin tinggi angka rata lama sekolah disuatu daerah maka akan semakin baik pula kualitas SDM yang dimilikinya.

Berikut grafik data Rata Lama Sekolah dalam satuan Tahun di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2018-2022:



Sumber: BPS Sumut (diolah, 2023)

Gambar 1.4 Grafik Rata Lama Sekolah (satuan tahun) Pada Tingkat Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

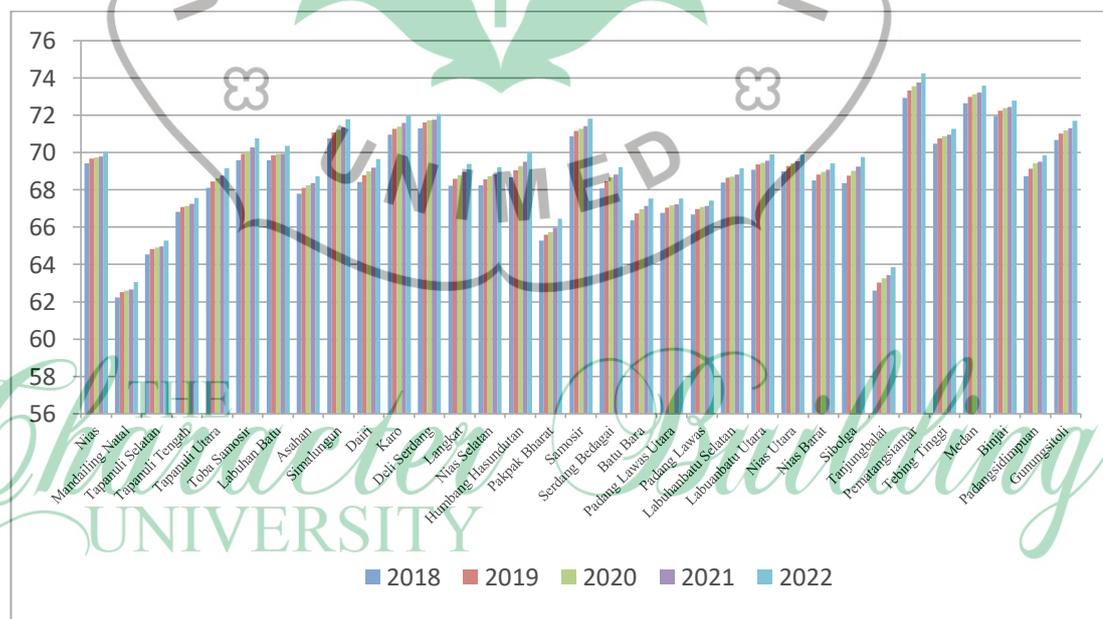
Berdasarkan grafik di atas, bisa diamati bahwa secara umum ataupun secara spesifik rata lama sekolah setiap kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara meningkat setiap tahunnya. Kabupaten dan kota yang memperoleh tingkat rata lama sekolah tertinggi adalah Kota Medan dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11.42 tahun sedangkan kabupaten dan kota yang memiliki rata lama sekolah terendah adalah Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata lama sekolah sebesar 5.7 tahun.

Dalam teori human capital dijelaskan bahwa penting meningkatkan sumber daya manusia dengan peningkatan pendidikan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka produktivitas penduduk akan meningkat. Dengan demikian, maka angka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan semakin meningkat. Sementara itu, upaya dalam pengukuran kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, salah satunya dengan melihat rata-rata lama sekolah (RLS) yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif (15 tahun keatas). Semakin tinggi RLS di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga produktivitas perekonomian daerah juga bisa meningkat.

Kajian yang mengaitkan rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teoritis tingkat pendidikan (RLS) jika mengalami kenaikan maka secara otomatis kemiskinan akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya diantaranya (Woyanti,2018) yang menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan hasil riset lain, (Giovanni,2018) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan rata-rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin. Oleh karena terdapat kesenjangan yang ditemukan dari hasil riset antar peneliti tersebut, sehingga kajian ini menjadi menarik diteliti untuk mengungkap lebih jauh pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap kemiskinan khususnya pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.

Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut World Health Organization (WHO), yang dimaksud dengan sehat yaitu keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang memungkinkan individu hidup secara produktif baik dalam aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 dituliskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan derajat kesehatan pada khususnya.

Berikut grafik data Angka Harapan Hidup (AHH) dalam satuan Tahun di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2018-2022:



Sumber: BPS Sumut (diolah, 2023)

Gambar 1.5 Angka Harapan Hidup (satuan tahun) Pada Tingkat Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik di atas, bisa diamati bahwa secara umum ataupun secara spesifik angka harapan hidup setiap kabupaten dan kota Provinsi Sumatera

Utara meningkat setiap tahunnya. Kabupaten dan kota yang memperoleh tingkat angka harapan hidup tertinggi adalah Kota Medan dengan rata-rata angka harapan hidup sebesar 73.11 tahun sedangkan kabupaten dan kota yang memiliki angka harapan hidup terendah adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan angka harapan hidup sebesar 62.61 tahun.

Perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan produktifitas mereka terutama yang bekerja. Hal ini disebabkan karena meningkatnya efesiensi kerja dimana kemampuan fisik dan mental mereka lebih baik sehingga hasil yang mereka terima akan lebih besar. Hal ini tentunya juga sangat berpengaruh baik pada perbaikan kesejahteraan masyarakat yang nantinya tercermin dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Menurut Mariyanti dan Mahfudz (2016), dalam konteks kesehatan, konsumsi nutrisi yang buruk dapat memberikan dampak pada tingkat kemiskinan sehingga negara yang penduduknya sehat juga diyakini akan memiliki perekonomian yang sehat.

Kajian yang mengaitkan antara angka harapan hidup (AHH) terhadap jumlah penduduk miskin sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teoritis ketika angka harapan hidup (AHH) mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya diantaranya (Woyanti,2018) yang menemukan bahwa angka harapan hidup berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan hasil riset lain, (Tjiabarata,2021) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin. Oleh karena terdapat kesenjangan yang ditemukan dari

hasil riset antar peneliti tersebut, sehingga kajian ini menjadi menarik diteliti untuk mengungkap lebih jauh pengaruh angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin khususnya pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus menjadi masalah yang berkepanjangan dan harus segera ditangani. Apalagi sejak wabah sejak tahun 2020-2021. Karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah menyebabkan permintaan akan beberapa kebutuhan konsumsi dan transportasi mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan tersebut, maka banyak perusahaan yang mengurangi operasional kerja dengan menerapkan pengurangan jam kerja serta melakukan Pemutusan Hubungan Kerja lalu meningkatkan jumlah pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada masa pandemi skala nasional dan regional sangat tinggi. Peningkatan tersebut imbas dari pandemi yang berdampak luas terhadap perekonomian. Pemerintah pusat telah bersinergi dengan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan khususnya di daerah Provinsi Sumatera Utara. Namun perlu dikhawatirkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu membawa perubahan terhadap penekanan Jumlah Penduduk Miskin tingkat Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara secara optimal.

Permasalahan jumlah penduduk miskin terus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah Sumatera Utara dengan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh masyarakat. Hal ini tentunya menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu tentang **“Pengaruh Jumlah**

Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara”

1.2 Identifikasi Masalah

Dapat diidentifikasi permasalahan dari latar belakang masalah diatas yaitu:

1. Jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara dalam beberapa kurun waktu terakhir mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan dikarenakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Sumatera Utara.
2. Krisis ekonomi global, terbatasnya pendapatan meningkatkan pengangguran yang cukup signifikan, serta terhentinya segala aktifitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadi fluktuasi jumlah penduduk miskin pada di Provinsi Sumatera Utara

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan variabel jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, rata lama sekolah dan angka harapan hidup.
2. Untuk tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan penelitian ini menggunakan variabel rata lama sekolah dan angka harapan hidup.
3. Data untuk variabel penelitian ini diambil dari kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara.

4. Data yang digunakan adalah data tahunan dalam kurun waktu 2018-2022

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh rata lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah ada pengaruh jumlah pengangguran, rata lama sekolah, dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rata Lama Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara?
3. Untuk mengetahui pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara?

4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pengangguran, Rata Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diinginkan yaitu dapat memberikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan, pemikiran, dan informasi kepada pihak lain yang berkepentingan khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi. Serta dijadikan acuan dan rujukan bagi penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan pengaruh jumlah pengangguran, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan kedepannya ataupun membuka usaha sehingga dapat menekan jumlah penduduk miskin dan terus berkontribusi terhadap negara serta memotivasi agar terus belajar mengetahui atau menggali informasi/pengetahuan tentang kemiskinan dan kaitannya ke perekonomian.

b. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu bagi mahasiswa, sekaligus menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk mahasiswa di perguruan tinggi akan pentingnya peran pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menekan angka kemiskinan dan peran diri sendiri untuk mendapatkan hidup yang layak.

c. Bagi Penulis

- Menjadi batu loncatan untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas diri sendiri agar siap menjadi tenaga kerja yang berkualitas ataupun membuka lapangan pekerjaan setelah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Jumlah Penduduk Miskin.
- Upaya untuk menganalisis apakah ada pengaruh jumlah pengangguran, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Negeri Medan.

d. Bagi Pihak Berikutnya

- Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan nilai tambah dikalangan akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan secara khusus bagi Program Studi Ilmu Ekonomi dalam mengetahui Pengaruh Jumlah Pengangguran, Rata Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

THE UNIVERSITY
Character Building

- Sebagai referensi civitas akademik Universitas Negeri Medan ataupun pihak-pihak lainnya secara umum dalam penelitian yang ingin mengkaji masalah yang sama atau mirip dimasa mendatang.

e. Bagi Pemerintah/Instansi Terkait

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau masukan dalam membuat suatu keputusan/kebijakan yang tepat dalam penyelesaian masalah ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara.



THE
Character Building
UNIVERSITY